



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENCABUTAN IJIN USAHA PT X BERMODAL ASING
TERKAIT DENGAN DITETAPKANNYA
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI**

TESIS

**NAMA : INTAN DEVITA ROSMALIA, S.H.
NPM : 0806427120**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENCABUTAN IJIN USAHA PT X BERMODAL ASING
TERKAIT DENGAN DITETAPKANNYA
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**NAMA : INTAN DEVITA ROSMALIA, S.H.
NPM : 0806427120**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Intan Devita Rosmalia, S.H.

NPM : 0806427120

Tandatangan : 


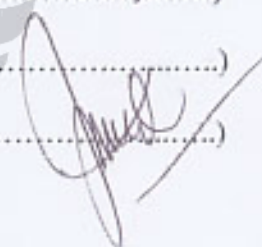
Tanggal : 29 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Intan Devita Rosmalia, S.H.
NPM : 0806427120
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Pencabutan Ijin Usaha PT X Bermodal Asing
Terkait Dengan Ditetapkannya Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan
Menara Bersama Telekomunikasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak Rahmat S.S. Soemadipradja, S.H., LL.M. (.....) 
Penguji : Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....) 
Penguji : Bapak DR. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 29 Juni 2010

KATA PENGANTAR

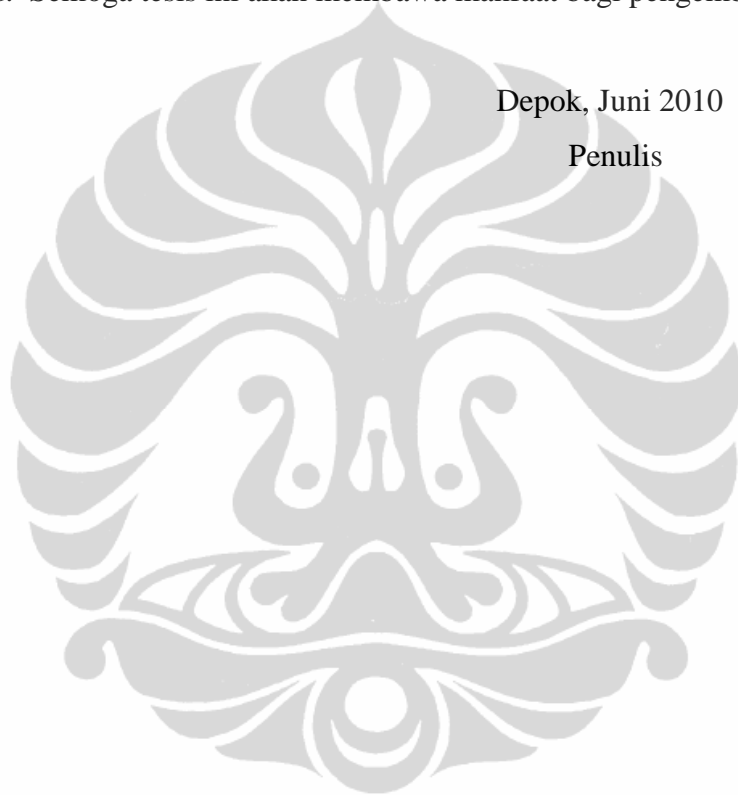
Alhamdulillahahirabbil ‘aalamiin saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

- 1) Bapak Rahmat S. S. Soemadipradja, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- 2) Ibu Wismar Ain Marzuki S.H., M.H., atas masukannya pada saat penulis mengajukan judul tesis ini;
- 3) Bapak DR. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H., selaku pembimbing akademis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia dan selaku dewan penguji tesis ini;
- 4) Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. selaku dewan penguji tesis ini;
- 5) Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, atas bimbingan dan bekal ilmu yang diberikan kepada penulis;
- 6) Seluruh Karyawan Sekretariat Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, yang telah memberikan pelayanan dan informasi akademik kepada penulis selama ini;
- 7) Suami saya, Adhi Wibowo S.T., atas masukan, bantuan, dan dukungannya dengan kasih sayang yang diberikan pada penulis selama ini, khususnya dalam pembuatan tesis ini;

- 8) Orang tua dan keluarga saya, atas bantuan dan dukungannya dengan kasih sayang yang diberikan pada penulis;
 - 9) Teman-teman Magister Kenotariatan Universitas Indonesia dan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, atas bantuan dan dukungannya;
 - 10) dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
- Saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juni 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Devita Rosmalia, S.H.
NPM : 0806427120
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

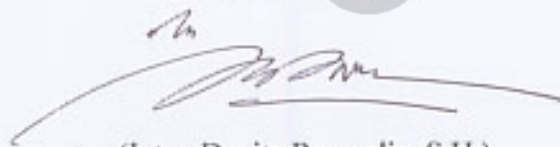
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pencabutan Ijin Usaha PT X Bermodal Asing Terkait Dengan Ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 29 Juni 2010
Yang Menyatakan



(Intan Devita Rosmalia, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Intan Devita Rosmalia, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pencabutan Ijin Usaha PT X Bermodal Asing Terkait Dengan
Ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan
Menara Bersama Telekomunikasi

Tesis ini membahas mengenai ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi yang berdampak pada pencabutan ijin usaha bagi PT X selaku penanam modal asing. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksploratoris. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah, khususnya Menteri Komunikasi dan Informatika harus lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan, memperhatikan dan mempelajari dengan seksama terlebih dahulu ketentuan-ketentuan terkait dengan kebijakan yang akan dibuatnya; diperlukan koordinasi antara pembuat kebijakan dalam bidang penanaman modal dengan pembuat kebijakan dalam bidang telekomunikasi; bagi investor (penanam modal) diperlukan pemahaman mengenai upaya hukum yang tersedia dalam bidang penanaman modal; dalam upaya hukum arbitrase, PT X dapat menegosiasikan untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya dalam penanaman modal di Indonesia dengan persyaratan tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (PT X dengan Pemerintah Indonesia).

Kata kunci:

Peraturan menteri, penanaman modal asing, menara telekomunikasi.

ABSTRACT

Name : Intan Devita Rosmalia, S.H.
Studi Program : Magister Kenotariatan
Title : Business License Revocation PT X with Foreign Capital
related with Enactment of Regulations of Minister
of Communications and Information of the Republic of Indonesia
Number: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 on Guideline Development
and Use of the Joint Telecommunications Tower

This thesis discussed the establishment of Minister of Communications and Information of the Republic of Indonesia Number: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 on Guideline Development and Use of Telecommunications Tower Joint impacting on the business license revocation for PT X as a foreign investor. This study is an exploratory qualitative research design. The results suggest that governments, particularly the Minister of Communications and Information should be more careful in making policy, pay attention to and carefully studied beforehand provisions related to the policy to be made; necessary coordination between policy makers in the field of investment with policymakers in telecommunication field; for investors is required an understanding of the available remedies in the field of investment; in the judicial arbitration, PT X still may be able to negotiate to continue its business activities in investment in Indonesia with certain requirements that can be beneficial to both parties (PT X with the Government of Indonesia).

Key words:
Regulation of the Minister, foreign investment, telecommunications towers.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	5
1.3 Metodologi Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
2. ANALISIS HUKUM MENGENAI PENCABUTAN IJIN USAHA PT X BERMODAL ASING TERKAIT DENGAN DITETAPKANNYA PERATURAN MENKOMINFO NOMOR: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008	9
2.1 Penanaman Modal di Indonesia	9
2.1.1 Pembaharuan Hukum Penanaman Modal Melalui UU Nomor 25 Tahun 2007	10
2.1.2 Asas-Asas dan Tujuan Penanaman Modal	11
2.1.3 Bidang Usaha Yang Terbuka Bagi Penanaman Modal	13
2.1.4 Pengesahan dan Perijinan Penanam Modal	16
2.1.5 BKPM	16
2.1.6 Penanaman Modal Asing di Indonesia	17
2.1.6.1 Sejarah dan Pandangan Terhadap Penanaman Modal Asing	20
2.1.6.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berinvestasi	24
2.1.7 Gangguan Terhadap Kenyamanan Penanaman Modal	24
2.1.8 Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal di Indonesia	25
2.1.9 Nasionalisasi dan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal ..	27
2.1.10 Upaya Merangsang Modal Asing	30
2.1.11 Jaminan kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia	33
2.2 Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia	36
2.2.1 Informasi dan Telekomunikasi	36
2.2.2 Perkembangan Teknologi Telekomunikasi	38
2.2.3 Telekomunikasi Menurut UU Nomor 36 Tahun 1999	39
2.3 Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004	43
2.3.1 Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri ...	44
2.3.1.1 Undang-Undang	44

2.3.1.2 Peraturan Presiden	45
2.3.1.3 Peraturan Menteri	45
2.3.2 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Menurut UU Nomor 10 Tahun 2004	46
2.4 Pencabutan Ijin Usaha PT X Yang Bermodalkan Asing	49
2.4.1 Ketentuan Dalam Peraturan Menkominfo Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Terkait Dengan Pencabutan Ijin Usaha PT X	50
2.4.2 Ketentuan Dalam Peraturan Bersama Terkait Dengan Pencabutan Ijin Usaha PT X	52
2.5 Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Ijin Usaha PT X Bermodal Asing Terkait Dengan Ditetapkannya Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi	53
2.5.1 Pelanggaran Asas Kepastian Hukum	53
2.5.2 Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	61
2.5.3 Upaya Hukum PT X	63
3. SIMPULAN DAN SARAN	68
3.1 Simpulan	68
3.2 Saran	69
DAFTAR REFERENSI	72
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi

